

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi pembangunan nasional dari menuju menjadi pemerataan yang lebih adil dan berimbang. Perubahan ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah akan lebih leluasa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diharapkan pemerintah daerah kota/kabupaten dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka melakukan pembangunan didaerahnya sebagai pertanggungjawaban publik.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah kota Bekasi melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan anggaran daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Dengan analisis ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Penganggaran keuangan daerah dikelola atas dasar efisiensi. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (*input*) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan.

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan pengeluaran dan penerimaan yang sama, atau dengan menaikkan pengeluaran dengan proporsi yang besar dengan kenaikan penerimaan yang proporsional, atau juga dengan menurunkan penerimaan dengan proporsi yang besar dan menurunkan pengeluaran secara proporsional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik memilih judul "*Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009-2011.*"

B. Perumusan Masalah:

1. Seberapa besar tingkat efisiensi pengalokasian anggaran pendapatan terhadap pengeluaran daerah di kota Bekasi tahun anggaran 2009-2011?
2. Analisis dari hasil perhitungan tingkat efisiensi pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah tahun anggaran 2009-2011?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Dapat mendeskripsikan dan mengetahui peranan anggaran dan pendapatan dalam perencanaan pembangunan kota Bekasi.
- b. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui seberapa efisien pengalokasian anggaran belanja Kota Bekasi tahun 2009-2011.

2. Manfaat penelitian

Penelitian Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya.
- b. Sebagai masukan bagi instansi pemerintahan daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan.

- c. Memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat Bekasi sejauh mana kinerja pemerintahan daerah Kota Bekasi dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
- d. Untuk melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan di program Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi Universitas Negeri Jakarta.